

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Pustaka

Pada Bab ini Penulis memaparkan beberapa teori dan konsep dari para ahli dan dari para peneliti sebelumnya tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.

##### 2.1.1 Auditing

Menurut Soekrisno Agoes (2012:3), dalam “Auditing” (Audit Akuntan Oleh Kantor Akuntan Publik)” pengertian auditing adalah sebagai berikut:

”Auditing adalah suatu audit yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”

Menurut Arens (2011:4) definisi audit adalah :

“Pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menetapkan dan melaporkan pada tingkatan mana mengenai kesesuaian antara informasi dan karakteristik yang ditetapkan. Audit juga harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten, orang yang independen.”

Menurut Sukrisno Agoes (2012:23) suatu laporan keuangan penting untuk diaudit karena:

- a. Jika tidak diaudit ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena itu laporan keuangan yang belum diaudit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut.
- b. Jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini *unqualified* (wajar tanpa pengecualian) dari KAP, berarti penggunaan laporan

keuangan bisa yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- c. Mulai tahun 2001 perusahaan yang total assetnya Rp 25 milyar keatas harus memasukan *audited financial statements*-nya ke departemen perdagangan dan perindustrian.
- d. Perusahaan yang sudah *go public* harus memasukan *audited financial statements*-nya ke BAPEPAM paling lambat 90 hari setelah tahun buku.
- e. SPT yang didukung oleh *audited financial statements* lebih dipercaya oleh pihak pajak dibandingkan dengan yang didukung oleh laporan keuangan yang belum diaudit.

### 2.1.1.1 Opini Audit

Opini audit merupakan bagian dari laporan audit yang merupakan informasi utama dari laporan audit. Pendapat auditor disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit baku. Laporan audit baku terdiri dari tiga paragraf, yaitu paragraf pengantar (*introductory paragraph*), paragraf lingkup (*scope paragraph*), dan paragraf pendapat (*opinion paragraph*). Paragraf pengantar dicantumkan sebagai paragraf pertama laporan audit baku, dimana terdapat tiga fakta yang diungkapkan oleh auditor dalam paragraf pengantar, yaitu tipe jasa yang diberikan oleh auditor, objek yang diaudit, pengungkapan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan tanggung jawab auditor atas pendapat yang diberikan atas laporan keuangan berdasarkan hasil auditnya (Setiadamayanthi, Ni Luh Ayu dan Md Gd Wirakusuma, 2016).

**Standar Profesional Akuntan Publik per 31 Maret 2011 (PSA 29 SA Seksi 508)** memaparkan ada lima jenis pendapat akuntan, yaitu:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*)

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelas (atau bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Keadaan tersebut meliputi:

- a. Pendapat wajar sebagaimana didasarkan atas laporan auditor independen lain.
- b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu.
- c. Standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- d. Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara

efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai.

- e. Di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan standar akuntansi atau dalam metode penerapannya.
- f. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif.
- g. Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) namun tidak disajikan atau tidak di *review*.
- h. Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia – Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapai prosedur audit yang berkaitan dengan informasi tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut.
- i. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan bilamana:

- a. Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat.
- b. Auditor yakin, atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS, yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.
- c. Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia harus menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraph terpisah yang dicantumkan sebelum paragraph pendapat. Pendapat wajar dengan pengecualian harus berisi kata frasa kata kecuali atau pengecualian dalam suatu frasa seperti kecuali untuk atau dengan pengecualian untuk. Frasa seperti tergantung atas atau dengan penjelasan berikut ini memiliki makna yang tidak jelas atau tidak cukup kuat oleh karena itu pemakaiannya harus dihindari. Karena catatan atas laporan keuangan merupakan bagian laporan keuangan auditan, kata-kata seperti disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, jika dibaca sehubungan dengan catatan 1

mempunyai kemungkinan untuk disalahtafsirkan dan oleh karena itu pemakaiannya harus dihindari.

4. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*)

Apabila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, ia harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam laporannya (a) semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar, dan (b) dampak utama hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas, jika secara praktis untuk dilaksanakan. Jika dampak tersebut tidak dapat ditentukan secara beralasan, laporan audit harus menyatakan hal itu.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut. Jika pernyataan tidak memberikan pendapat disebabkan pembatasan lingkup audit, auditor harus menunjukan dalam paragraf terpisah semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut. Ia harus menyatakan bahwa lingkup auditnya tidak memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor tidak harus menunjukan prosedur yang dilaksanakan dan tidak harus menjelaskan karakter auditnya dalam suatu paragraf (yaitu, paragraf lingkup audit dalam laporan auditor dalam laporan auditor bentuk baku). Jika auditor menjelaskan bahwa auditnya dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, tindakan ini dapat

mengakibatkan kaburnya pernyataan tidak memberikan pendapat. Sebagai tambahan, ia harus menjelaskan keberatan lain yang berkaitan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK/ETAP/IFRS.

#### **2.1.1.1.1. Laporan Auditor**

Laporan auditor adalah media formal yang digunakan oleh auditor dalam mengkomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan tentang kesimpulan atas laporan keuangan yang diaudit. Dalam menerbitkan laporan audit, auditor harus memenuhi empat standar pelaporan yang ditetapkan dalam standar auditing yang berlaku umum (**Boynton, William C. 2002:73**).

##### 1. Laporan Standar

Suatu laporan standar merupakan laporan lazim diterbitkan. Laporan ini memuat pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kesimpulan ini hanya akan dinyatakan bila auditor telah membentuk pendapat berdasarkan audit yang dilaksanakan sesuai GAAS. Penyimpangan dari laporan standar tergolong dalam salah satu dari dua kategori berikut :

##### a. Laporan standar dengan bahasa penjas

Jenis laporan ini paragraf pendapat tetap menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, karena laporan keuangan sesuai dengan GAAP. Namun terdapat beberapa kondisi yang mengharuskan auditor

menambahkan paragraf penjas atau bahasa penjelasan lain pada laporan standar. Sebagai contoh, bila entitas memilih untuk mengubah prinsip-prinsip akuntansi, misalnya perubahan metode penyusutan, maka pedoman yang harus diikuti adalah APB Opinion No. 20, yang mengharuskan entitas memberikan alasan perubahan tersebut, menerapkan metode akuntansi yang tepat untuk jenis perubahan khusus tersebut, serta membuat pengungkapan yang sesuai dalam catatan kaki.

b. Jenis-jenis pendapat lain

Kategori kedua penyimpangan dari laporan standar adalah apabila terjadi salah satu kondisi berikut ini :

Laporan standar mengandung penyimpangan yang material dari GAAP.

Auditor tidak mampu mendapatkan bukti kompeten yang cukup berkenaan dengan satu atau lebih asersi manajemen, sehingga tidak memiliki dasar yang memadai untuk memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan secara keseluruhan. Dalam hal ini auditor akan menyatakan salah satu jenis pendapat berikut ini:

- a. Pendapat wajar dengan pengecualian
- b. Pendapat tidak wajar
- c. Menolak memberikan pendapat



## 2. Laporan Pertanggung Jawaban Manajemen

Disebutkan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sedangkan auditor bertanggung jawab untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor menekankan adanya pembagian tanggung jawab tersebut pada paragraf pendahuluan laporan standar auditor.

Hal – hal yang perlu dipertimbangkan oleh auditor dalam mengeluarkan laporan auditnya terhadap laporan keuangan dan kelangsungan hidup perusahaannya antara lain (Agoes, Sukrisno, 2012:87) :

1. Kewajiban auditor untuk memberikan saran bagi kliennya dalam mengungkapkan dampak kondisi ekonomi tersebut (jika ada) terhadap kemampuan entitas di dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.
2. Pengungkapan peristiwa kemudian yang mungkin timbul sebagai akibat dari ekonomi tersebut.
3. Modifikasi laporan auditor bentuk baku jika memburuknya kondisi ekonomi tersebut berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

### 2.1.1.1.2. Laporan Keuangan

Informasi keuangan harus disajikan dengan menggunakan asumsi-asumsi. Dalam ilmu ekonomi dikenal dengan asumsi *ceteris paribus* atau asumsi yang menyebutkan faktor-faktor lain tidak berubah sehingga akan diperoleh hasil tertentu. Teori akuntansi juga menyebutkan bahwa laporan keuangan sebagai

suatu informasi harus disusun dengan menggunakan beberapa asumsi yang mendasari yaitu (**Purba, Marisi P. 2009:19**) :

1. Periode akuntansi
2. Unit moneter
3. *Going concern*
4. Entitas terpisah

Laporan keuangan adalah asersi atau pernyataan tentang kinerja dan posisi keuangan yang disusun dalam satuan unit moneter (dalam Rupiah) untuk masa waktu tertentu biasa disebut dengan satu periode akuntansi oleh pihak pengelola entitas tersebut (**Purba, Marisi P. 2009:20**).

Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuatifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan (*financial statements*) yang sering disajikan adalah (1) neraca, (2) laporan laba-rugi (3) laporan arus kas dan (4) laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham (**Kieso, Donald E. dkk, 2008:2**).

Ketika laporan keuangan dibuat sesuai dengan kerangka penyajian yang wajar (*fair presentation*), evaluasi yang diwajibkan juga termasuk apakah laporan keuangan memenuhi syarat penyajian yang wajar akan meliputi pertimbangan mengenai (**Tuanakotta, Theodorus M. 2013:513**) :

- a. Presentasi, struktur, dan isi secara keseluruhan dari laporan keuangan dan

- b. Apakah laporan keuangan termasuk catatan (atas laporan keuangan) mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya, dengan cara mencapai penyajian yang wajar.

**SPAP.341.12 Alinea 04 (2011)** memaparkan auditor harus memperoleh dan mempertimbangkan informasi mengenai rencana manajemen dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas. Jika setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor tetap menyimpulkan adanya keraguan substansial atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas, maka auditor harus mempertimbangkan dampak terhadap laporan keuangan, termasuk kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan. Beberapa informasi yang harus dipertimbangkan oleh auditor yang terkait dengan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi dan peristiwa yang relevan dengan penyebab terjadinya keraguan substansial atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas.
- b. Dampak atas kondisi dan peristiwa tersebut terhadap laporan keuangan
- c. Evaluasi manajemen atas signifikansi dari kondisi dan peristiwa tersebut, serta faktor-faktor yang dapat mengurangi signifikansi tersebut.
- d. Rencana manajemen untuk menghadapi kondisi dan peristiwa tersebut
- e. Informasi mengenai pemulihan atau klasifikasi dari jumlah aset yang tercatat, maupun jumlah atau klasifikasi dari liabilitas.

Setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor menyimpulkan bahwa keraguan substansial atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas telah berkurang, maka auditor harus mempertimbangkan pengungkapan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen atas kondisi dan peristiwa utama yang pada awalnya menyebabkan auditor meyakini adanya keraguan substansial tersebut.

Pertimbangan auditor atas kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan harus mencakup dampak atas kondisi dan peristiwa tersebut terhadap laporan keuangan, serta faktor-faktor yang menyebabkan telah berkurangnya keraguan substansial tersebut, termasuk rencana manajemen terkait (**SPAP.341.12 Alinea 05 (2011)**).

**Purba, Marisi P. (2009:21)** menjelaskan bahwa Asumsi *going concern* adalah salah satu asumsi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan sesuai entitas ekonomi. Asumsi ini mengharuskan entitas ekonomi secara operasional dan keuangan memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya atau *going concern*. Kemampuan mempertahankan kelangsungan hidup adalah salah satu syarat suatu laporan keuangan disusun dengan menggunakan basis akrual, yaitu dasar pencatatan transaksi yang dilakukan pada saat terjadinya, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau diberikan. Jika suatu entitas bisnis tidak memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka laporan keuangan entitas tersebut wajib disusun berdasarkan asumsi lain yakni likuidasi dan nilai realisasi sebagai basis pencatatan.

Asumsi *going concern* ada kalanya tidak dapat dipertahankan karena suatu entitas ekonomi tidak lagi dapat mempertahankan aktivitas ekonominya. Kondisi ini bisa diakibatkan oleh adanya kegagalan bisnis yang disebabkan oleh banyak hal. Dalam menentukan apakah asumsi *going concern* masing berlaku atau tidak, tahapan-tahapan kegagalan bisnis perlu diperhatikan (**Purba, Marisi P. 2009:21**).

### 2.1.2 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala, yaitu dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Secara umum biasanya ukuran perusahaan diproksi dengan total aset. Karena nilai total aset biasanya sangat besar dibandingkan variabel keuangan lainnya, variabel aset diperhalus menjadi Ln (aset) (**Ginting, Suriani dan Linda Suryana, 2014**).

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln dari Total Aset}$$

Variabel ukuran perusahaan digunakan untuk menentukan seberapa besar atau kecilnya perusahaan sample. Pengukuran variable diukur melalui natural logaritma dari total asset (**Heryanto, Agus 2016**).

**Mutchler, 1985 dalam Ginting, Suriani dan Linda Suryana (2014)** menyatakan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan opini *going concern* pada perusahaan dengan aset yang lebih kecil. Maka semakin besar aset perusahaan akan semakin kecil kemungkinan perusahaan menerima opini *going concern*. Sedangkan menurut **Amalia, Krisna Ayu (2016)**, ukuran perusahaan

menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aset, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aset.

**Alichia, Yashinta Putri (2013)**, menjelaskan bahwa ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aset, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aset. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diproksikan dengan total aset perusahaan. Total aktiva dipilih sebagai proksi atas ukuran perusahaan dengan mempertimbangkan bahwa nilai aktiva relatif lebih stabil dibanding nilai *market capitalized* dan penjualan Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam **UU No. 20 tahun 2008** dalam **Amalia, Krisna Ayu (2016)**:

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Asset (Tidak Termasuk tanah & Bangunan Tempat Usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	50 Juta - 100 Juta	300 Juta - 2,5 Milyar
Usaha Menengah	10 Juta - 10 Milyar	2,5 Milyar - 50 Milyar
Usaha Besar	$\geq 10$ Milyar	$\geq 50$ Milyar

**Tabel 2.1. Kriteria Ukuran Perusahaan**

*Sumber : Amalia, Krisna Ayu (2016)*

**Harris, Randy (2015)** ukuran perusahaan adalah suatu skala pengukuran di mana perusahaan dapat dikategorikan menjadi perusahaan yang besar atau kecil menggunakan beberapa cara pengukuran, antara lain: total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Nilai dari aset menunjukkan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Nilai

penjualan menunjukkan perputaran uang yang dapat dihasilkan oleh perusahaan. Nilai kapitalisasi pasar menunjukkan seberapa besar perusahaan dikenal oleh masyarakat. Nilai aset dipilih sebagai dasar perhitungan ukuran perusahaan karena nilai yang dimiliki relatif lebih stabil dibandingkan dengan proksi lain, karena menurut **Widyantari, 2010 dalam Harris, Randy (2015)** perusahaan dengan nilai total aktiva yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan karena dalam tahap ini keadaan arus kas perusahaan sudah positif dan perusahaan dianggap mempunyai prospek yang baik dalam jangka waktu yang lumayan panjang.

Menurut **Agnes Sawir (2004: 101-102) dalam Lutfi, Muchamad (2016)** ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinasi keuangan dalam hampir studi dan untuk sejumlah alasan berbeda. Pertama, ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Perusahaan kecil umumnya kekurangan akses ke pasar modal yang terorganisir, baik untuk obligasi maupun saham. Walaupun mereka mempunyai akses, mereka mempunyai akses, biaya peluncuran (*flotation cost*) dari penjualan sejumlah kecil sekuritas dapat menjadi penghambat. Jika penerbitan sekuritas dapat dilakukan, sekuritas perusahaan kecil mungkin dapat dipasarkan sehingga membutuhkan penentuan harga sedemikian rupa agar investor memperoleh hasil yang menentukan return lebih tinggi secara signifikan.

**Kieso, Donald E. dkk (2008:193)** menjelaskan bahwa aktiva merupakan manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh di masa depan, atau di kendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa

lalu. Sedangkan menurut **Priyati, Novi (2013:8)** aktiva adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan. Aktiva terdiri dari aktiva lancar adalah aktiva yang umur pemakaian satu kali pakai habis atau maksimum habis dipakai dalam satu kali periode akuntansi umumnya satu tahun. Aktiva lancar terdiri atas kas, efek-efek/surat berharga, wesel tagih, persediaan barang dagangan, perlengkapan, biaya dibayar dimuka, investasi jangka panjang, piutang usaha dan sebagainya. Aktiva tetap adalah aktiva yang pemakaiannya berulang-ulang atau umur pemakaiannya mengalami penyusutan kecuali tanah, umumnya penyusutan dihitung pada akhir periode akuntansi. Jenis-jenis aktiva tetap antara lain : tanah, gedung, investaris, keadaan, mesin dan lain-lain. Aktiva tetap tak berwujud adalah aktiva yang secara fisik tidak terlihat oleh panca indera tetapi mempunyai nilai ekonomis. Jenis-jenisnya antara lain : *good will*, hak paten, hak cipta dan lain-lain.

### **2.1.3 Debt Default**

*Debt default* didefinisikan sebagai kegagalan perusahaan dalam membayar hutang pokok dan atau bunganya pada saat jatuh tempo. Status *debt default* dilihat dari pernyataan auditor dalam laporan tahunan perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan gagal membayar hutang dan bunganya. Variabel ini diukur dengan variabel dummy, kode 1 untuk status debt default, dan kode 0 untuk status tidak debt default. ( **Alex, Murtin & Choirul Anam, 2008**).

*Debt default* didefinisikan sebagai kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar utang pokok dan/atau bunganya pada waktu jatuh tempo. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. Nilai 1 digunakan



untuk status *debt default*, dimana perusahaan tidak mampu membayar utangnya pada waktu jatuh tempo. Sedangkan, nilai 0 untuk status tidak *debt default*, dimana perusahaan sudah mampu membayar utangnya sebelum waktu jatuh tempo. Untuk mengetahui apakah perusahaan itu mengalami status *debt default* atau tidak dapat dilihat dari :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Apabila hasilnya negatif maka *debt default*, namun apabila hasilnya positif maka non *debt default*. **(Kumala, Khusnul 2015)**.

*Debt default* didefinisikan sebagai kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar hutang pokok dan/atau bunganya pada waktu jatuh tempo. *Debt default* atau kegagalan dalam pembayaran hutang atau kegagalan dalam memenuhi perjanjian hutang merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan litigasi atau tuntutan pengadilan terhadap perusahaan. Apabila jumlah tuntutan tersebut material akan dapat mempengaruhi kelanjutan usaha perusahaan. **(Nanda, Fini Rizki dan Siska, 2015)**

Menurut **Chen dan Church (1992)** dalam **Harris, Randy (2015)** mengungkapkan *debt default* sebagai kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar hutang pokok dan/atau bunganya pada waktu jatuh tempo. Manfaat status *debt default* yang menemukan adanya hubungan yang kuat status default terhadap opini *going concern*. Sebelumnya auditor lebih cenderung disalahkan karena tidak berhasil mengeluarkan opini yang tepat, karena perusahaan sudah mendapat opini wajar tanpa pengecualian tetapi tetap bangkrut. Biaya kegagalan yang dikeluarkan perusahaan akan lebih tinggi untuk mengeluarkan opini *going*

concern ketika perusahaan sedang berada dalam kondisi default. Karenanya, diharapkan status *default* dapat meningkatkan kemungkinan auditor mengeluarkan laporan *going concern*.

Indikator *going concern* yang banyak digunakan auditor dalam memberikan keputusan opini audit adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutangnya (*default*). *Debt default* didefinisikan sebagai kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar hutang pokok dan/atau bunganya pada waktu jatuh tempo. Auditor cenderung disalahkan karena tidak berhasil mengeluarkan opini *going concern* setelah adanya beberapa peristiwa perusahaan yang bangkrut meskipun mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Biaya kegagalan untuk mengeluarkan opini *going concern* akan lebih tinggi ketika perusahaan dalam keadaan default. Karenanya, diharapkan status *default* dapat meningkatkan kemungkinan auditor mengeluarkan laporan *going concern* (Praptirorini, Mirna Dyah dan Indira Januarti, 2011).

#### **2.1.4. Opini Audit *Going Concern***

Pendapat Auditor (opini audit) merupakan bagian dari laporan audit yang merupakan informasi utama dari laporan audit. Opini Audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan simpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Arens (2008: 58) mengemukakan bahwa laporan audit adalah langkah terakhir dari seluruh proses audit. Dengan demikian, auditor dalam memberikan pendapat sudah didasarkan pada keyakinan profesionalnya. Opini audit tersebut dinyatakan

dalam paragraf pendapat dalam laporan audit.. Laporan audit baku terdiri dari tiga paragraf, yaitu paragraf pengantar (*introductory paragraph*), paragraf lingkup (*scope paragraph*), dan paragraf pendapat (*opinion paragraph*). Paragraf pengantar dicantumkan sebagai paragraf pertama laporan audit baku, dimana terdapat tiga fakta yang diungkapkan oleh auditor dalam paragraf pengantar, yaitu tipe jasa yang diberikan oleh auditor, objek yang diaudit, pengungkapan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan tanggung jawab auditor atas pendapat yang diberikan atas laporan keuangan berdasarkan hasil auditnya **(Alichia, Yasintha Putri 2013)**.

*Going concern* adalah salah satu konsep yang paling penting yang mendasari pelaporan keuangan **(Gray dan Manson, 2000 dalam Harris, Randy 2015)**. Sedangkan menurut **Heryanto, Agus (2016)** *Going concern* adalah kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama periode waktu pantas, yaitu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan auditan. Menurut **Lestari, Wahyu Puji (2009)** dengan adanya *going concern* maka suatu badan usaha dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. *Going concern* sebagai asumsi bahwa perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya secara langsung akan mempengaruhi laporan keuangan. Laporan keuangan yang disiapkan menggunakan dasar *going concern* kemungkinan akan berbeda secara substansial dengan laporan keuangan yang disiapkan pada asumsi bahwa perusahaan tidak *going concern*. Laporan keuangan yang disiapkan pada dasar *going concern* akan mengasumsikan bahwa

perusahaan akan bertahan melebihi jangka waktu pendek. Seorang auditor ketika memeriksa kondisi keuangan suatu perusahaan dalam audit tahunan, auditor harus menyediakan laporan audit untuk digabungkan dengan laporan keuangan perusahaan. Salah satu dari hal-hal penting yang harus diputuskan adalah apakah perusahaan dapat mempertahankan hidupnya (*going concern*). Audit report dengan modifikasi mengenai *going concern*, mengindikasikan bahwa dalam penilaian auditor terdapat resiko perusahaan tidak dapat bertahan dalam bisnis.

Tujuan penyusunan laporan keuangan beragam, yaitu untuk menyajikan informasi keuangan relevan, dapat dihamai, dapat diversifikasi, netral, tepat waktu, memiliki daya banding dan lengkap untuk pengambilan keputusan keuangan. Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan disusun dengan menggunakan asumsi *going concern* sebagai salah satu postulat akuntansi mempengaruhi berbagai asumsi pelaporan keuangan. Asumsi *going concern* adalah postulat akuntansi yang digunakan sebagai dasar untuk pencatatan dengan menggunakan basis akrual dan basis penilaian seperti biaya historis dan nilai sekarang. Postulat *going concern* perlu ditetapkan sebagai konvensi akuntansi, yang mendasari basis akrual dan konsep biaya historis (**Purba, Marisi P. 2009:48**).

**Purba, Marisi P. (2009:50)** menyatakan bahwa asumsi *going concern* adalah asumsi kelangsungan hidup perusahaan sebagai suatu oknum yang terpisah dari pemiliknya. Asumsi *going concern* hanya berlaku bagi teori entitas atau organisasi bermotif laba. Sedangkan menurut **SPAP (2011)** Opini *going concern*

adalah opini audit yang dikeluarkan oleh auditor karena terdapat keraguan mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Opini audit *going concern* adalah opini audit modifikasi yang dalam pertimbangan auditor terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian signifikan atas kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan operasinya (**Ginting, Suriani dan Linda Suryana, 2014**).

Pengukuran variabel ini merupakan variabel dummy. Apabila perusahaan mendapatkan opini *going concern* diberikan tanda 1 dan apabila tidak mendapatkan opini *going concern* diberikan tanda 0 (**Wijaya, Edwin dan Ni Ketut Rasmini, 2015**).

Audit *going concern* adalah opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (**SPAP, 2001 dalam Harris, Randy, 2015**). Sedangkan menurut **Heryanto, Agus (2016)** Opini audit *going concern* merupakan opini audit yang dikeluarkan oleh auditor untuk mengevaluasi apakah ada kesangsian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Opini audit *going concern* menunjukkan bahwa perusahaan dapat beroperasi dalam kurun waktu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan audit. Bagi auditor eksternal, penentuan opini audit harus dikaitkan dengan penggunaan asumsi *going concern* dalam menyusun laporan keuangan. Auditor eksternal harus mengidentifikasi setiap tahap kegagalan bisnis. Identifikasi tersebut harus dilakukan dengan mengevaluasi bukti-bukti audit yang diperoleh selama pekerjaan lapangan dan evaluasi dilakukan dengan

judgment pada saat menentukan opini audit apa yang akan diberikan (**Purba, Marini P. 2009:63**).

Faktor- Faktor yang mempenaruhi Opini Audit *Going Concern* Seperti yang diungkapkan oleh dalam penelitian januarti (2008) menyebutkan bahwa:

1. Reputasi Auditor

Auditor bertanggungjawab untuk meyediakan informasi yang berkualitas tinggi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Auditor yang bereputasi baik cenderung akan menerbitkan opini audit *going concern* jika klien terdapat masalah berkaitan *going concern* perusahaan.

2. *Auditor Client Tenure*

*Auditor client tenure* merupakan jumlah tahun dimana KAP melakukan perikatan audit pada perusahaan yang sama. Sekian lama hubungan auditor dengan klien, maka dikhawatirkan semakin rendah pengungkapan atas ketidakmampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan usahanya.

3. *Mandatory Disclosure*

*Disclosure* adalah pengungkapan atau penjelasan, penerimaan informasi oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat *disclosure* perusahaan, maka semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan menerima opini audit *going concern*.

4. Opini Audit Tahun Sebelumnya

Opini Audit *Going Concern* yang telah diterima *auditee* pada tahun sebelumnya akan menjadi faktor pertimbangan yang penting bagi auditor dalam mengeluarkan opini audit *going concern* pada tahun berjalan jika kondisi keuangan *auditee* tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan atau tidak adanya rencana manajemen yang dapat direalisasikan untuk memperbaiki kondisi perusahaan.

5. *Debt Default*

6. *In Sales (size)*

7. *Auditor client tenure*

8. Opini tahun sebelumnya

9. Kualitas Auditor

10. Kepemilikan terpusat

11. *Financial distress*

Tujuan auditor dalam audit kesinambungan usaha antara lain

**(Tuanakotta, Theodorus M. 2013: 220) :**

1. Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang tepat/tidaknya penggunaan asumsi kesinambungan usaha oleh manajemen dalam membuat laporan keuangan.
2. Menyimpulkan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah ada ketidakpastian material mengenai peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya sebagai yang berkesinambungan.

3. Menentukan implikasinya terhadap laporan auditor.

**Tuanakotta, Theodorus M. (2013: 221)** menyatakan bahwa dibawah asumsi usaha berkesinambungan, suatu entitas dianggap mempunyai usaha yang berkesinambungan dalam waktu dekat di masa mendatang. Laporan keuangan yang bertujuan umum dibuat dengan dasar kesinambungan usaha, kecuali jika manajemen mempunyai niat/rencana melikuidasi entitas itu atau berhenti beroperasi, atau tidak ada alternative yang realistis kecuali membubarkannya. Laporan keuangan yang bertujuan khusus dapat atau tidak dapat dibuat dengan kerangka pelaporan keuangan di mana dasar kesinambungan usaha itu relevan (contoh, dasar kesinambungan usaha tidak relevan untuk laporan keuangan yang dibuat atas dasar pajak/*tax* basis di negara tertentu). Dalam hal penggunaan asumsi usaha berkesinambungan itu tepat, aset dan kewajiban dicatat atas dasar entitas itu dapat merealisasi asetnya dan menyelesaikan kewajibannya dalam kegiatan bisnisnya yang normal.

**Tuanakotta, Theodorus M. (2013:223)** menyatakan bahwa keraguan yang besar mengenai asumsi kesinambungan usaha antara lain :

1. Indikator keuangan
  - a. Posisi utang bersih (*net liability position*) atau utang lancar bersih (*net current liability position*).
  - b. Pinjaman yang mendekati tanggal jatuh tempo tanpa prospek yang reliatis untuk perpanjangan atau pelunasan, atau ketergantungan yang besar akan pinjaman jangka pendek untuk membelanjai aset tetap.



- c. Indikasi penarikan dukungan dari para kreditur.
  - d. Arus kas operasional yang negatif seperti terlihat dalam laporan keuangan historis maupun prospektif.
  - e. Rasio keuangan utama yang buruk.
  - f. Kerugian operasional yang besar.
  - g. Penurunan nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas, secara signifikan.
  - h. Menunggak membayar deviden atau bahkan menghentikannya sama sekali.
  - i. Ketidakmampuan membayar para kreditur pada tanggal jatuh temponya utang.
  - j. Ketidakmampuan memenuhi syarat-syarat pinjaman .
  - k. Perubahan transaksi pembelian dari transaksi kredit ke tunai transaksi.
  - l. Ketidakmampuan memperoleh pendanaan untuk mengembangkan produk baru atau investasi yang sangat penting.
2. Indikator Operasional
- a. Niat/rencana manajemen untuk melikuidasi entitas atau berhenti beroperasi.
  - b. Hilangnya anggota (tim inti) manajemen, tanpa penggantian.
  - c. Kehilangan pasar yang sangat penting, pelanggan utama, *franchise, license*, atau pemasok utama.

- d. Kesulitan dengan SDM, mogok kerja berkepanjangan, bentrokan dalam pabrik dan seterusnya.
  - e. Kekurangan pemasok untuk bahan baku/mesin yang penting.
  - f. Munculnya saingan baru yang sangat sukses.
3. Lain-lain
- a. Ketidapatuhan mengenai kewajiban permodalan.
  - b. Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atau ketentuan *startuter* (anggaran dasar).
  - c. Tuntutan hukum terhadap entitas yang belum *final* (masih pending), yang jika berhasil, dapat berdampak buruk (ketidakmampuan entitas memenuhi tuntutan tersebut).
  - d. Perubahan undang-undang, ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang berdampak buruk bagi entitas.
  - e. Bencana besar yang tidak diasuransikan atau yang *underinsured* (asuransi terlalu rendah).

**AU 341.06, *The Auditor Consideration of an Entity's Ability to Continue as a Going Concern (SAS 59)* dalam Boynton, William C. (2002:374)** menunjukkan bahwa informasi yang bertentangan dengan asumsi kelangsungan usaha mencakup :

1. *Tren Negatif* seperti kerugian operasi yang berulang, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari aktivitas operasi, dan rasio keuangan kunci yang buruk.

2. Petunjuk lain dari kemungkinan kesulitan keuangan seperti tidak dapat membayar hutang atau perjanjian pinjaman, penunggakan pembayaran deviden, restrukturisasi utang, dan ketidaktaatan terhadap persyaratan modal dasar.
3. *Masalah internal* seperti penghentian kerja, ketergantungan yang besar pada keberhasilan proyek tertentu, dan komitmen jangka panjang yang tidak ekonomis.
4. *Masalah eksternal* seperti kerugian pada *franchise* atau waralaba yang penting; kerugian yang tidak diasuransikan dari gempa bumi atau banjir.

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas melanjutkan usahanya secara berkesinambungan, antara lain **(Tuanakotta, Theodorus M. 2013: 225) :**

1. Kemampuan entitas menghadapi kondisi buruk, entitas kecil dapat bereaksi cepat untuk menyerap peluang baru, tetapi sering kali mempunyai sumber daya terbatas untuk melanjutkan usaha.
2. Tersedianya sumber-sumber pembelanjaan, bank, dan kreditur lain menghentikan pinjaman atau dukungan sama sekali, atau pemilik (atau pihak ketiga yang masih terkait dengan pemilik) menarik dukungan/agunan/jaminan pribadi.
3. Menghadapi perubahan besar seperti kehilangan pemasok utama, pelanggan besar, pegawai penting, lisensi untuk beroperasi, *franchise* atau perikatan hukum lainnya.

Tahapan proses audit atas kesinambungan usaha (**Tuanakotta, Theodorus M. 2013: 219**) :

- 1) *Risk Assessment* (Penilaian Resiko)
  - a. Pertimbangkan dan tanya kepada manajemen apakah ada peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan usahanya sebagai usaha yang berkesinambungan.
  - b. Telaah penilaian yang dilakukan manajemen (*management assessment*) tentang kemungkinan adanya peristiwa atau kondisi tersebut diatas, dan tanggapan atau rencana manajemen menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut
  - c. Tetap waspada terhadap peristiwa atau kondisi yang berpotensi mengancam kesinambungan usaha selama berlangsungnya audit.
  - d. Tanya kepada manajemen tentang peristiwa atau kondisi di luar/sesudah periode penilaian yang dilakukan manajemen.
  - e. Pertimbangkan fakta atau informasi tambahan yang masuk secara bertahap (kewaspadaan selama audit berlangsung).
- 2) *Reporting* (Pelaporan)
  - a. Tentukan apakah :
    - ✓ Ketidakpastian material terjadi, berkenaan dengan peristiwa atau kondisi yang diidentifikasi
    - ✓ Penggunaan asumsi bahwa usaha entitasnya akan berkesinambungan, masih tepat.

- b. Apakah laporan keuangan menjelaskan secara utuh “kekhawatiran” akan peristiwa atau kondisi, dan mengungkapkan setiap ketidakpastian yang material.
- c. Peroleh representasi manajemen (*management representations*)

Langkah auditor dalam menangani masalah kesinambungan usaha antara

lain (**Tuanakotta, Theodorus M. 2013:227**) :

1. Dapatkan penilaian dan Rencana Manajemen  
Jika auditor belum memperolehnya, minta manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas melanjutkan usahanya secara berkesinambungan.
2. Evaluasi rencana manajemen
  - a. Evaluasi rencana manajemen untuk menanggapi penilaian tentang kesinambungan usaha.
  - b. Apakah *outcome* dari rencana tersebut dapat memperbaiki keadaan.
  - c. Apakah rencana tersebut feasible dalam situasi yang dihadapi.
  - d. Berapa andalnya prakiraan laba/ arus kas, dan hal apa yang mendukung asumsi yang digunakan.
- 3) Identifikasi, bahas dan peroleh bukti mengenai faktor lain yang mungkin berdampak terhadap kemampuan kesinambungan usaha entitas, seperti :
  - a. Hasil operasi terakhir, buruk atau sangat buruk.
  - b. Pelanggaran syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.
  - c. Kesulitan keuangan yang diungkapkan dalam pertemuan pimpinan entitas, dan terekam dalam risalah rapat.

- d. Adanya litigasi/tuntutan hukum dan taksiran mengenai implikasi keuangannya.
  - e. Ada/tidaknya, sah/tidaknya, dan dapat dipaksakan (enforceability)/tidaknya pengaturan yang memberikan atau mempertahankan dukungan keuangan dari pihak terkait dan pihak ketiga.
  - f. Kemampuan keuangan pihak terkait dan pihak ketiga untuk pendanaan tambahan atau pemberian jaminan.
  - g. Peristiwa kemudian (*subsequent events*) lainnya.
  - h. Indikasi kecurangan seperti *management override*, transaksi fiktif, atau menyembunyikan fakta penting yang material.
- 4) Masih berlanjutnya (tidak diakhirinya) fasilitas pinjaman dan dengan syarat yang sama.
  - 5) Laporan mengenai tindakan/sanksi yang dijatuhkan regulator.
  - 6) Dalam hal penjualan aset, apakah ada dukungan yang cukup? Ada (calon) pembeli.
  - 7) Juga pertimbangkan apakah fakta atau informasi tambahan tersedia, sejak tanggal manajemen melaksanakan penilaian.
3. Minta representasi tertulis
- Minta representasi tertulis dari manajemen dan jika perlu dari TCWG (*those charged with governance*) tentang rencana mereka untuk tindakan di masa mendatang dan tentang dari rencana tersebut.

Akuntan publik sebagai auditor eksternal harus mampu mengkombinasikan prosedur-prosedur audit untuk memperoleh bukti audit yang memadai yang menunjukkan bahwa asumsi *going concern* masih berlaku. Prosedur-prosedur tersebut dilakukan pada tahapan perencanaan, pekerjaan lapangan dan penyelesaian. Terdapat banyak jenis pengujian yang dapat dilakukan oleh auditor eksternal sebagai alat untuk melakukan pengujian *going concern*. Ada tiga jenis pengujian yang harus dilakukan oleh auditor eksternal (**Purba, Marisi P. 2009:85**):

1. Prosedur analitik
2. Prosedur pengujian pengawasan internal
3. Prosedur pengujian peristiwa setelah tanggal neraca

Ketiga jenis pengujian tersebut di atas sebaiknya dikombinasikan pada saat dilakukan prosedur audit, sehingga dapat memberikan kesimpulan yang akurat. Prosedur analitik dan pengujian pengawasan intern, sebenarnya ada dalam tahap perencanaan audit dan pekerjaan lapangan. Dan prosedur pengujian atas peristiwa setelah tanggal neraca dilakukan pada tahap penyelesaian audit (**Purba, Marisi P. 2009:86**).

Prosedur evaluasi yang dilakukan auditor, pada umumnya meliputi (**Tuanakotta, Theodorus M. 2013:225**) :

1. Pembahasan dengan manajemen tentang pembelanjaan entitas dalam jangka menengah dan panjang.
2. Menguatkan informasi mengenai niat manajemen dengan pemahaman auditor mengenai entitas dan bukti-bukti dokumentasi.

3. Melihat apakah kewajiban manajemen untuk memperpanjang periode penialainnya setidaknya-tidaknya 12 bulan. Ini dapat dicapai melalui pembahasan, bertanya, dan inspeksi dokumen pendukung, dan hasil penilaian auditor apakah semua upaya ini *feasible*. Sebagai contoh, prakiraan tentang penjualan di masa mendatang dapat didukung dengan order penjualan.
4. Menanyakan apakah manajemen tahu tentang peristiwa atau kondisi di luar periode yang diliput oleh penilaian manajemen, yang menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas melanjutkan usahanya secara berkesinambungan.

Salah satu perbedaan yang paling mendasar adalah dalam hal pendekatan yang dilakukan auditor dalam menangani isu *going concern* pada perusahaan kliennya. Standar audit yang dikeluarkan oleh AICPA menggunakan pendekatan ‘aktif’ yang mengharuskan auditor proaktif dalam melakukan evaluasi terhadap ada tidaknya keraguan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidup. ISA 570 menggunakan pendekatan ‘pasif’, sebab standar tersebut tidak secara eksplisit mengharuskan auditor melakukan evaluasi terhadap ketepatan asumsi *going concern* yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan (Purba, Marisi P. 2009:65).

**Tuanakotta, Theodorus M. (2013:228)** memaparkan tentang kesimpulan auditor dan kewajiban pelaporannya mengenai kesinambungan usaha antara lain :



**Tabel 2.2 Kesimpulan Auditor dan Pelaporan Mengenai Kesiambungan****Usaha**

<b>ISA</b>	<b>PENJELASAN</b>
570.17	<p>Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor wajib menyimpulkan apakah menurut pendapat auditor, ada ketidakpastian material terkait peristiwa atau kondisi yang sendiri-sendiri atau bersama dapat menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya secara berkesinambungan.</p> <p>Ketidakpastian material ada/terjadi jika besaran dari dampak potensial dan kemungkinan terjadinya sedemikian rupa sehingga menurut auditor, harus ada pengungkapan yang tepat mengenai sifat dan implikasi dari ketidakpastian tersebut untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal kerangka pelaporan keuangan dengan penyajian wajar, tercapainya penyajian yang wajar (<i>fair presentation</i>) dari laporan keuangan atau</li> <li>b. Dalam hal kerangka pelaporan keuangan dengan kepatuhan, agar laporan keuangan tidak menyesatkan.</li> </ol>
570.18	<p>Jika auditor menyimpulkan asumsi usaha berkesinambungan memang tepat dalam situasi tersebut, namun ketidakpastian material, auditor wajib, menentukan apakah laporan keuangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjelaskan dengan cukup peristiwa atau kondisi yang menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya secara berkesinambungan dan rencana manajemen untuk menyelesaikan peristiwa atau kondisi tersebut, dan</li> <li>b. Mengungkapkan dengan jelas adanya ketidakpastian material berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya secara berkesinambungan dan karenanya entitas mungkin tidak mampu merealisasi aset dan menyelesaikan kewajibannya</li> </ol>

	dalam kegiatan bisnisnya yang normal
570.19	<p>Jika pengungkapan yang cukup sudah dibuat dalam laporan keuangan, auditor wajib memberikan pendapat yang tidak dimodifikasi (pendapat wajar tanpa pengecualian) dan mencantumkan alinea <b>penekanan suatu hal</b> (<i>emphasis of matter paragraph</i>) dalam laporan audit untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menekankan adanya ketidakpastian material berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya secara berkesinambungan dan</li> <li>Menarik perhatian (pembaca) pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang disyaratkan</li> </ol>
570.20	<p>Jika pengungkapan tidak cukup dibuat dalam laporan keuangan, auditor wajib memberikan pendapat wajar dengan pengecualian (WDP) atau pendapat tidak wajar (TW), tergantung mana yang tepat. Auditor wajib menyatakan dalam laporan auditor adanya ketidakpastian material berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya secara berkesinambungan.</p>
570.21	<p>Jika laporan keuangan dibuat dengan dasar usaha berkesinambungan, yang menurut auditor, penggunaan asumsi usaha berkesinambungan oleh manajemen adalah tidak tepat, wajib memberikan pendapat tidak wajar (TW).</p>
570.22	<p>Jika manajemen tidak bersedia membuat atau memperluas penilaiannya ketika diminta oleh auditor, auditor wajib mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor.</p>
570.23	<p>Kecuali jika semua TCWG (<i>those charge with governance</i>) terlibat dalam pengelolaan entitas, auditor wajib mengkomunikasikan dengan TCWG peristiwa atau kondisi yang diidentifikasi menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya secara berkesinambungan. Komunikasi dengan TCWG itu</p>

	<p>akan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Apakah peristiwa atau kondisi tersebut merupakan ketidakpastian material</li> <li>Apakah asumsi usaha berkesinambungan sudah tepat dalam membuat dan menyajikan laporan keuangan dan</li> <li>Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan</li> </ol>
570.24	<p>Jika ada penundaan dalam persetujuan mengenai laporan keuangan oleh manajemen atau TCWG (<i>those charge with governance</i>) sesudah tanggal laporan keuangan, auditor wajib menanyakan alasan untuk penundaan tersebut. Jika auditor percaya bahwa penundaan tersebut berkaitan dengan peristiwa atau kondisi dalam penilaian mengenai kesinambungan usaha, auditor wajib melakukan prosedur audit lanjutan, dan juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kesimpulan auditor mengenai adanya ketidakpastian material.</p>

*Sumber : Tuanakotta, Theodorus M. (2013:228)*

#### 2.1.4.1 Penekanan Suatu Hal

**Tuanakotta, Theodorus M. (2013:585)** memaparkan alinea penekanan suatu hal dimaksudnya untuk menekankan hal-hal penting yang sebenarnya sudah disajikan/diungkapkan dalam laporan keuangan, untuk meningkatkan pemahaman para pemakai laporan keuangan mengenai laporan keuangan itu.

Alinea penekanan suatu hal menunjuk ke hal-hal yang disajikan/diungkapkan dalam laporan keuangan dan bukan substitusi dari *disclosure*. Alinea ini tidak lebih rinci dari yang sudah disajikan dalam laporan keuangan. Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa hal tersebut tidak disalah sajian secara material dalam laporan keuangan. Alinea ini mengindikasikan bahwa pendapat auditor tidak dimodifikasi.

**Tuanakotta, Theodorus M. (2013:585)** mewajibkan auditor dalam hal tertentu memasukkan alinea penekanan suatu hal dalam laporan auditor :

**Tabel 2.3. Alinea Penekanan Suatu Hal**

ISA	JUDUL dan TERJEMAHAN JUDUL	ALINEA
210	<i>Agreeing the Terms od Audit Engagements</i> (Menyetujui syarat-syarat dalam Penugasan Audit)	19 (b)
560	<i>Subsequent Events</i> (Peristiwa Kemudian)	12 (b), 16
570	<i>Going Concern</i> (Usaha Berkelanjutan)	19
800	<i>Special Consideration – Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Special Purpose Framwork</i> (Pertimbangan Khusus - Audit atas Laporan Keuangan yang dibuat sesuai kerangka tujuan khusus)	14

Sumber : Tuanakotta, Theodorus M. (2013:585)

Ada dua jenis aline tambahan (**Tuanakotta, Theodorus M. 2013:584**)

**Tabel 2.4. Jenis Aline Tambahan**

Alinea	Penerapan
Penekanan atas suatu hal ( <i>emphasis of matter</i> )	Menarik perhatian pemakai/pembaca laporan keuangan mengenai hal-hal penting dalam laporan keuangan, yang sudah diaungkapkan dalam laporan keuangan. Hal-hal yang disajikan/diungkapkan dalam laporan keuangan begitu penting bagi pemakai/pembaca laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan.
Contoh	Ketidakpastian karena litigasi atau tuntutan hukum yang luar biasa atau tindakan regulator, peristiwa kemudian ( <i>subsequent events</i> ), bencana alam yang sangat besar, dan ketidakpastian lainnya yang signifikan dan penerapan lebih awal (jika diperkenankan) dari suatu standar akuntansi baru
Hal (atau hal-hal)	Hal-hal lain yang penting bagi pemakai/pengguna laporan

lain ( <i>other matter</i> )	untuk memahami fungsi audit, tetapi yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan. Segala hal yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan, yang penting bagi pemakai laporan keuangan untuk memahami audit, tanggung jawab auditor, dan/atau laporan auditor.
Contoh	Tidak dapatnya auditor mengundurkan diri dari penugasan, tanggung jawab tambahan yang diberikan kepada auditor, dan pembatasan dalam penyebaran laporan auditor.

*Sumber : Theodorus M. Tuanakotta (2013:584)*

**Tuanakotta, Theodorus M. (2013:512)** menyatakan bahwa kesimpulan untuk merumuskan opini auditor wajib menyimpulkan mengenai apakah auditor telah memperoleh asurans yang memadai/wajar tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji yang material, apakah karena kecurangan atau kesalahan. Kesimpulan ini akan memperhitungkan :

- a. Kesimpulan auditor mengenai apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh.
- b. Kesimpulan auditor mengenai apakah salah saji yang belum dikoreksi secara terpisah atau bergabung adalah material.
- c. Evaluasi yang diwajibkan.

Ketentuan utama dalam menggunakan alinea penekanan suatu atas suatu hal antara lain (**Tuanakotta, Theodorus M. 2013:585**) :

**Tabel 2.5. Penggunaan Alinea Penekanan Suatu Hal**

<b>Kondisi</b>	<b>Komentar</b>
Sudah diungkapkan dengan penuh ( <i>full disclosed</i> ) dalam laporan keuangan	Alinea penekanan atas suatu hal menunjuk ke hal-hal yang disajikan/diungkapkan dalam laporan keuangan dan bukan substitusi dari <i>disclosure</i> . Alinea ini tidak lebih rinci dari yang sudah disajikan dalam laporan keuangan.
Tidak ada salah saji yang material	Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa hal tersebut tidak disalah saji secara material dalam laporan keuangan.
Disajikan langsung sesudah pendapat audit	Alinea ini disajikan sesudah alinea yang berisi pendapat auditor, namun sebelum bagian mengenai tanggung jawab pelaporan lainnya. Alinea ini diberi judul “Penekanan atas Suatu Hal” atau judul lain yang tepat.
Bukan modifikasi pendapat audit	Alinea ini mengindikasikan bahwa pendapat auditor tidak dimodifikasi

Sumber : Tuanakotta, Theodorus M. (2013:585)

**SPAP 341.14 Alinea 09 (2011)** memaparkan auditor menerbitkan laporan auditor yang tidak menyatakan pendapat yang terkait dengan ketidakpastian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas ketika kedua kondisi dibawah ini terjadi :

- a. Terdapat demikian banyaknya (*pervasive*) dan signifikannya dampak yang potensial terhadap laporan keuangan yang disebabkan oleh beberapa ketidakpastian yang material yang terkait dengan kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas; dan
- b. Terdapat kemungkinan yang besar (*imminent*) bahwa penyelesaian dari ketidakpastian yang terkait dengan kemampuan entitas dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas berpotensi menghasilkan penyelesaian yang tidak menguntungkan (*unfavorable outcome*), sehingga laporan keuangan secara keseluruhan menjadi tidak berarti.

**SPAP 341.13 Alinea 07 (2011)** memaparkan auditor harus mempertimbangkan, mengevaluasi, dan mendokumentasikan seluruh hal di bawah ini dalam kertas kerja auditnya :

- a. Kondisi dan peristiwa yang menyebabkan auditor menyimpulkan adanya keraguan substansial atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas.
- b. Unsur-unsur dalam rencana manajemen yang menurut auditor merupakan unsur-unsur yang signifikan dalam mengatasi dampak yang sangat buruk atas kondisi dan peristiwa tersebut terhadap laporan keuangan.
- c. Prosedur audit yang telah dilakukan dan bukti audit yang diperoleh dalam mengevaluasi unsur-unsur yang signifikan dari rencana manajemen tersebut.
- d. Kesimpulan auditor atas masih terdapat atau telah berkurangnya keraguan substansial atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas.
- e. Kesimpulan auditor perlu tidaknya mencantumkan paragraf penjelas dalam laporannya.

#### 2.1.4.2. Kegagalan Usaha

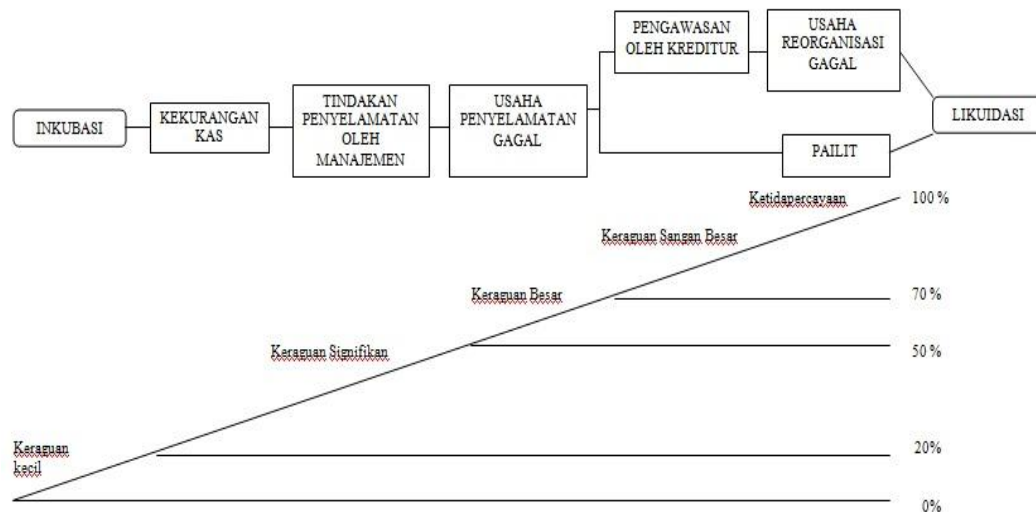
Kegagalan usaha adalah sesuatu yang sebenarnya bisa diprediksi dengan menggunakan berbagai pendekatan teori ilmu keuangan. Keberlangsungan hidup entitas bisnis dipengaruhi oleh kendala eksternal dan internal. Kendala eksternal dapat berupa kendala dari luar perusahaan seperti pasar, kondisi moneter, sosial, politik, dan lain-lain. Sedangkan kendala internal adalah kendala di dalam perusahaan itu seperti kondisi keuangan, sumber daya manusia, budaya perusahaan, penguasaan teknologi, pengawasan internal dan lain-lain. Kendala eksternal dan internal tersebut dapat dijadikan indikator dalam menentukan apakah asumsi *going concern* masih berlaku atau tidak, atau dengan kata lain, apakah keraguan atas kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (**Purba, Marisi P. 2009:35**).

Akuntan yang bertindak baik sebagai auditor eksternal maupun sebagai akuntan perusahaan baik sebagai auditor eksternal maupun sebagai akuntan perusahaan yang bertugas menyusun laporan keuangan harus dapat melihat tingkat kemungkinan kegagalan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal tersebut membutuhkan penilaian dari seorang akuntan dengan memperhatikan aspek hukum dan perundang-undangan yang berlaku atas perusahaan tersebut (**Purba, Marisi P. 2009:25**).

Kesediaan pihak pemegang saham dan kreditur melakukan pendanaan dan restrukturisasi hutang perusahaan yang sudah jatuh tempo, harus dipertimbangkan dalam melakukan penilaian apakah asumsi *going concern* masih berlaku. Perusahaan yang dinilai secara keuangan baik, bisa saja setahun



kemudian dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar kewajiban yang telah jatuh tempo. Kegagalan perusahaan ditentukan oleh resiko pailitnya perusahaan tersebut yang diindikasikan oleh resiko pailitnya perusahaan tersebut yang diindikasikan oleh faktor keuangan maupun non-keuangan (**Purba, Marisi P. 2009:26**).



**Gambar 2.1 Tahapan Kegagalan Usaha**

*Sumber: Purba, Marini P. 2009:27*

Indikator-indikator kegagalan perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian besar, yaitu faktor ekonomi umum, kondisi industri, dan kondisi entitas. Jika suatu indikator merupakan indikator ekonomi umum, maka dapat disimpulkan, entitas-entitas bisnis yang lain yang ada di suatu Negara juga kemungkinan besar terkena dampak. Indikator kondisi industri menunjukkan bahwa industri tertentu sedang mengalami kelesuan, sehingga mungkin berimplikasi kepada kegagalan usaha. Sedangkan indikator kondisi entitas menunjukkan bahwa sebenarnya entitas itu secara spesifik sedang bermasalah (**Purba, Marisi P. 2009:40**).

Indikator-indikator ekonomi umum dapat berupa tingkat inflasi, resesi ekonomi, tingkat pertumbuhan yang rendah atau bahkan negatif, kondisi moneter yang tidak mendukung, devaluasi mata uang dan lain-lain. Indikator-indikator industri dapat berupa kondisi pasar yang lesu, tingkat persaingan yang sangat ketat, regulasi industri yang tidak memihak, dan penurunan kinerja keuangan rata-rata industri. Sedangkan indikator-indikator kondisi entitas dapat berupa rendahnya profitabilitas, rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi, pelepasan aktivitas bisnis dan lain-lain (**Purba, Marisi P. 2009:41**). Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan indikator kegagalan usaha adalah ukuran perusahaan, jenis industri, kepemilikan perusahaan, keunggulan manajemen dan lain-lain. Observasi yang dilakukan terhadap kondisi dan aktivitas perusahaan juga dapat memberikan informasi yang signifikan tentang kondisi perusahaan (**Purba, Marisi P. 2009:42**).

## 2.2. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.6. Penelitian Terdahulu**

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variable	Perbedaan Penelitian	Simpulan
1	Agus Heryanto (2016)	ANALISIS PENGARUH KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN, KUALITAS AUDITOR, OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN	X1: Kondisi Keuangan Perusahaan X2: Kualitas Auditor X3: Opini Audit Tahun Sebelumnya X4: Ukuran Perusahaan Y: Opini Audit Going Concern	Perbedaannya terletak pada jumlah variabel penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh Agus Heryanto menggunakan empat variabel independent	Kualitas auditor berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern sedangkan kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern.
2	Krisna Ayu Amalia (2016)	PENGARUH AUDITOR CLIENT TENURE, UKURAN PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, REPUTASI AUDITOR, LEVERAGE, DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN	X1: Auditor Client Tenure X2: Ukuran Perusahaan X3: Pertumbuhan Perusahaan X4: Reputasi Auditor X5: Leverage X6: Financial Distress Y: Opini Audit Going Concern	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada tahun observasi yang ditelitinya selama empat tahun dari tahun 2010-2014	variabel auditor client tenure, ukuran perusahaan, reputasi auditor, dan leverage mempunyai pengaruh signifikan terhadap opini audit going concern, sedangkan variabel pertumbuhan perusahaan dan financial distress tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap opini audit going concern pada perusahaan
3	Desak Nyoman Sri Werastuti	PENGARUH AUDITOR CLIENT TENURE, DEBT DEFAULT, REPUTASI AUDITOR, UKURAN KLIEN DAN KONDISI KEUANGAN TERHADAP KUALITAS AUDIT MELALUI OPINI AUDIT GOING CONCERN	X1: Auditor Client Tenure X2: Debt Default X3: Reputasi Auditor X4: Ukuran Klien X5: Kondisi Keuangan Y: Penerimaan Opini Going Concern	Perbedaan penelitian ini terletak pada Populasi yang digunakan menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2008-2011	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, terbukti bahwa auditor client tenure, ukuran klien, reputasi auditor dan kondisi keuangan tidak berhubungan dengan opini audit going concern, sedangkan debt default berhubungan dengan opini audit going concern.

4	Suriani Ginting & Linda Suryana (2014)	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPINI AUDIT GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA	X1: Ukuran Perusahaan X2: Kondisi Keuangan X3: Pertumbuhan Perusahaan X4: Reputasi Auditor Y: Penerimaan Opini Going Concern	Perbedaan penelitian ini terlihat pada jumlah variabel independen dan jumlah tahun pengamatan yang diteliti	secara parsial, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern, sedangkan kondisi keuangan, pertumbuhan perusahaan dan reputasi auditor berpengaruh terhadap opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012.
5	Randy Harris (2015)	PENGARUH DEBT DEFAULT, DISCLOSURE, OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA, UKURAN PERUSAHAAN, DAN OPINION SHOPPING TERHADAP PENERIMAAN OPINI AUDIT GOING CONCERN	X1: Debt Default X2: Disclosure X3: Opini Audit Tahun Sebelumnya X4: Ukuran Perusahaan X5: Opinion Shopping Y: Penerimaan Opini Audit Going Concern	Perbedaan penelitian ini terlihat pada jumlah sampel yang digunakannya sebesar 24 perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa debt default, disclosure, opini audit tahun sebelumnya dan opinion shopping berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern.
6	Alex Murtin & Choirul Anam (2008)	PENGARUH KUALITAS AUDIT, DEBT DEFAULT DAN KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP PENERIMAAN OPINI GOING CONCERN	X1: Kualitas Audit X2: Debt Default X3: Kondisi Keuangan Perusahaan Y: Penerimaan Opini Going Concern	Perbedaan dalam penelitian ini terlihat pada periode pengamatan yang dilakukan selama 8 tahun dari tahun 2000-2008	Kualitas audit yang diukur dengan besarnya KAP berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern. Debt default berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern

### **2.3. Kerangka Pemikiran**

#### **2.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Opini Audit *Going Concern***

**Alichia, Yashinta Putri (2013)** mengasumsikan bahwa perusahaan dengan ukuran besar memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan auditor dalam memberikan kalimat modifikasi *going concern* pada perusahaan besar. Semakin besar ukuran perusahaan maka kemungkinan perusahaan dalam menerima opini audit *going concern* akan semakin kecil begitupun sebaliknya. Sedangkan menurut **Purba, Marisi P. (2009:42)** Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan indikator kegagalan usaha adalah ukuran perusahaan, jenis industri, kepemilikan perusahaan, keunggulan manajemen dan lain-lain. Observasi yang dilakukan terhadap kondisi dan aktivitas perusahaan juga dapat memberikan informasi yang signifikan tentang kondisi perusahaan

**Harris, Randy (2015)** menjelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap pemilihan agen karena perusahaan yang besar cenderung akan menjadi subjek pemeriksaan (pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan masyarakat) yaitu dengan mencari manajer yang benar-benar dapat dipercaya dan mengetahui secara jelas kapabilitas dan personaliatas dengan kontrak insentif dan skema kompensasi operasional yang jelas sehingga memotivasi agen untuk bekerja sesuai dengan kepentingan principal dengan penghargaan yang wajar terhadap principal

Menurut **Santosa dan Wedari (2007) dalam Kristiana, Ira (2012)** menyatakan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan opini audit going concern pada perusahaan kecil, karena auditor mempercayai bahwa perusahaan besar dapat menyelesaikan keuangan yang dihadapinya daripada perusahaan kecil. Oleh karenanya diharapkan dengan semakin besarnya perusahaan akan semakin kecil perusahaan menerima opini audit *going concern*.

### **Hipotesis 1 : Terdapat Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Opini Audit *Going Concern***

#### **2.3.2 Pengaruh *Debt Default* Terhadap Opini Audit *Going Concern***

Menurut **Harris, Randy (2015)** didalam penelitiannya menyebutkan bahwa Berdasarkan teori agensi, prinsipal menilai kinerja agen menggunakan pihak auditor, untuk mengetahui keadaan perusahaan. Auditor akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan, terutama pada kegiatan utang. Apabila perusahaan gagal membayar utang (*debt default*) maka keberlangsungan perusahaan itu akan menjadi diragukan, oleh sebab itu kemungkinan diberikannya opini audit *going concern* akan semakin besar, dan investasi oleh pihak luar akan menurun.

**Istiana, Siti (2010)** Kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutang dan atau bunganya pada saat jatuh tempo akan mempengaruhi perusahaan dalam menjalankan usahanya, sehingga kemungkinan opini audit *going concern* akan dikeluarkan oleh auditor.

Menurut **Irfana, Muhammad Jauhan dan Dul Muid (2012)** menyebutkan bahwa Indikator yang digunakan dalam mengukur kelangsungan hidup suatu perusahaan atau *going concern* adalah kegagalan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutang atau bunga pada waktu jatuh tempo (PSA 30). Hal pertama yang akan dilakukan oleh auditor untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan adalah dengan memeriksa hutang perusahaan. Ketika suatu perusahaan memiliki hutang yang tinggi, maka kas yang ada di perusahaan akan diarahkan untuk menutup hutang yang dimiliki perusahaan yang dampaknya akan mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Dan saat perusahaan kesulitan untuk memenuhi hutangnya, auditor akan memberikan status default untuk perusahaan tersebut. Dengan asumsi tersebut, diharapkan status default yang dikeluarkan oleh auditor dapat meningkatkan kemungkinan auditor mengeluarkan opini *going concern*

**Hipotesis 2 : Terdapat Pengaruh *Debt Default* terhadap Opini Audit *Going Concern***

#### **2.4. Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2016:93) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel

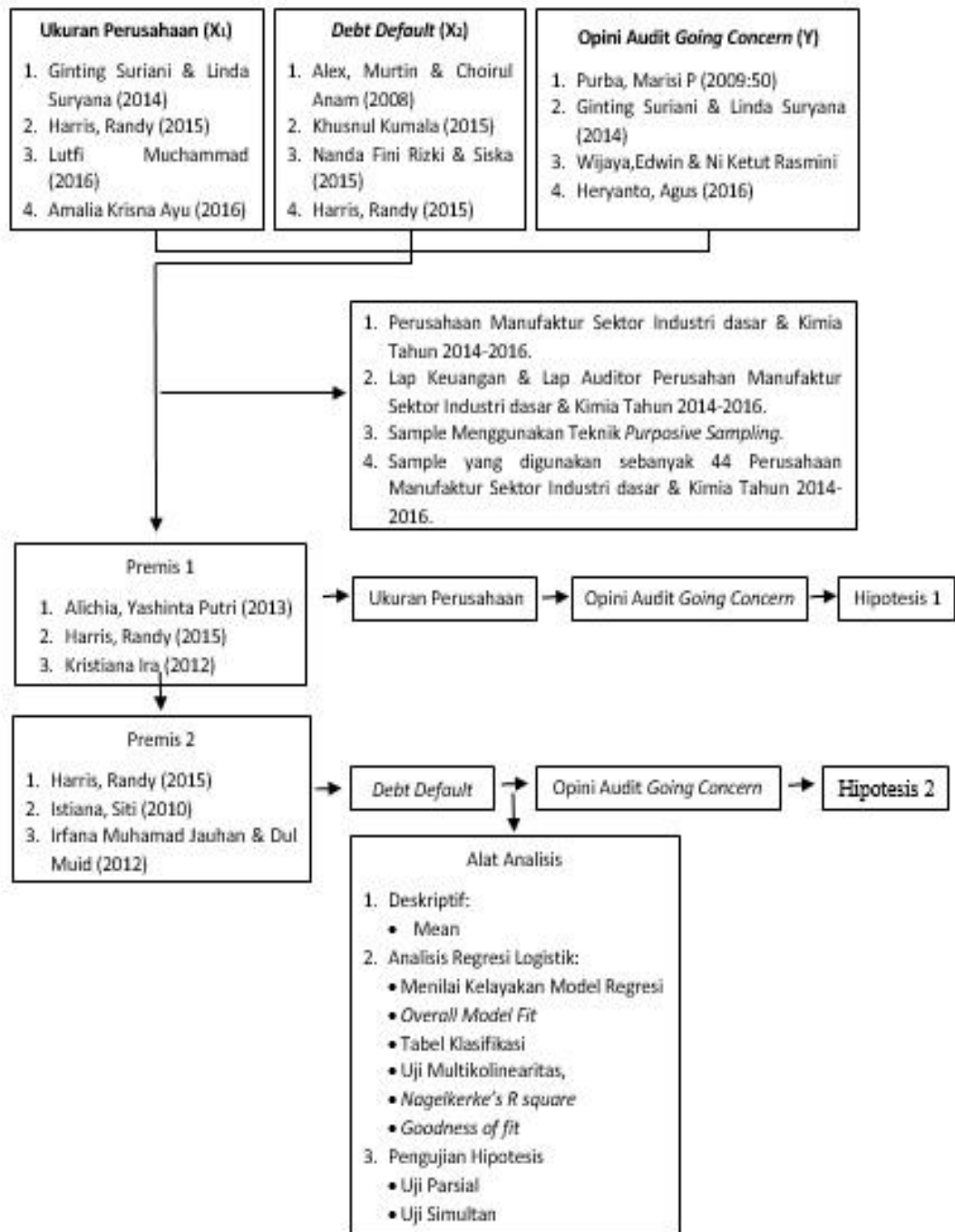
*independent* terhadap variabel *dependent*. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Hipotesis 1 (H<sub>1</sub>)** : Terdapat Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Opini Audit *Going Concern*

**Hipotesis 2 (H<sub>2</sub>)** : Terdapat Pengaruh *Debt Default* terhadap Opini Audit *Going Concern*

**Hipotesis 3 (H<sub>3</sub>)**: Terdapat Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Debt Default* terhadap Opini Audit *Going Concern* secara bersama-sama





**Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran Secara Keseluruhan**